

GELANDANGAN DALAM PEMBERITAAN DI *SOLOPOS.COM*: ANALISIS WACANA KRITIS

Ayu Prawitasari, S.S

Dr. Titis Srimuda Pitana, S.T, M.Trop.Arch

Mahasiswa Pascasarjana Kajian Budaya UNS

Dosen Pascasarjana Kajian Budaya UNS

ayu.prawitasari@yahoo.com

titisptana@gmail.com

Abstrak: Berita mengenai gelandangan jarang sekali muncul di media massa, khususnya media online. Saat muncul pun temanya selalu masuk kategori berita kriminal dengan tag kisah tragis, gelandangan tewas, Polres, rumah sakit, dan sejenisnya.

Solopos.com selama tujuh bulan yakni Maret-Oktober 2017 hanya menampilkan enam berita mengenai gelandangan, tiga di antaranya tentang gelandangan tewas di jalan dan hutan, dua berita mengenai gelandangan yang melahirkan di jalan, dan satunya lagi mengenai razia gelandangan oleh Satpol PP. Tidak ada berita yang menampilkan kehidupan gelandangan sebagai bagian dari komunitas perkotaan atau dari sudut pandang mereka.

Meski gelandangan adalah fakta yang seharusnya bisa dimunculkan di media massa, namun berita sejatinya bukanlah sebuah fakta mentah. Berita merupakan rekonstruksi sederet peristiwa yang dilakukan wartawan. Tema mengenai gelandangan bagi media massa belum cukup memadai untuk diangkat menjadi sebuah berita lantaran minimnya nilai berita. Nilai berita ini berkaitan erat dengan tingkat keterbacaan di masyarakat.

Media massa sejatinya adalah arena pertentangan kelas. Melalui berita, setiap kelas berusaha memenangkan wacana kelompoknya. Pandangan kritis melihat akses ke media lebih banyak dimanfaatkan kelompok dominan (kelompok pembaca) yang mendudukan gelandangan sebagai entitas di luar kelompok masyarakat. Dengan demikian ideologi media massa seringkali merupakan ideologi dominan.

Praktik ini menyebabkan wacana inferior milik para gelandangan tentang gagalnya negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi warganya tidak terungkap, berganti menjadi teks yang memosisikan gelandangan sebagai entitas yang meresahkan komunitas kota sehingga harus dirazia.

Kata Kunci: gelandangan, ideologi, wacana marginal

PENDAHULUAN

Masalah Penelitan

Ada tiga persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu,

1. Mengapa tema gelandangan jarang sekali diberitakan di media *online*, khususnya, *Solopos.com*?
2. Bagaimana sudut pandang berita yang ditampilkan di media massa mengenai gelandangan?
3. Bagaimana pula implikasi minimnya pemberitaan mengenai gelandangan terhadap kebijakan pemerintah daerah?

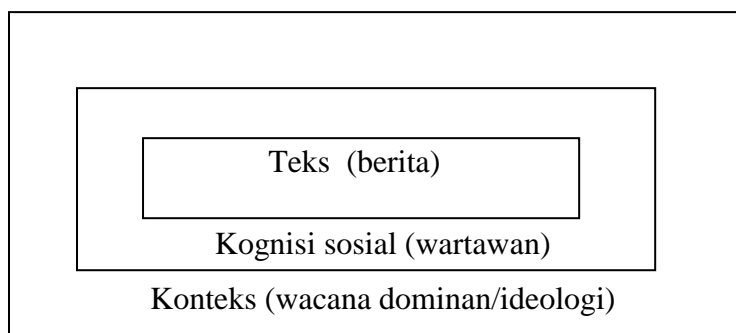
Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan Teun A. Van Dijk dengan pertimbangan kelengkapan elemen-elemen pembedah dalam menganalisis sebuah teks. Pendekatan Van Dijk lebih dikenal dengan pendekatan kognisi sosial.

Dengan pendekatan ini, Van Dijk berusaha memberikan penyadaran kepada pembaca bahwa teks (berita) tidak lahir dari ruang hampa. Teks disusun para wartawan dengan kognisi mental tertentu yang memengaruhi cara mereka merekonstruksi sebuah realita.

Sebuah teks yang memarginalkan kelompok minoritas menggambarkan bagaimana sudut pandang si pembuat teks. Wartawan sebagai pihak yang membuat teks memiliki nilai-nilai dan pandangan tertentu atas sebuah realita. Berita yang memarginalkan gelandangan menunjukkan cara pandang wartawan atas keberadaan wartawan yang menguntungkan kelompok dominan.

Nilai-nilai dan sudut pandang yang dianut wartawan juga bukan sesuatu yang datang secara alamiah, namun hasil pembelajaran dari sebuah konteks besar di mana wartawan termasuk di dalamnya. Apabila konteks yang berkembang di masyarakat adalah wacana dominan, akan terlihat ideologi apa yang diusung dan direproduksi oleh wartawan atau media massa terhadap sebuah berita. Melalui pendekatan Van Dijk kita bisa tahu bagaimana sebuah teks diproduksi secara komprehensif.



Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkritisi pesan dalam teks berita karena mengandung relasi sosial yang timpang. Dalam penulisan berita yang berkaitan dengan gelandangan, wartawan memberikan akses yang sangat besar kepada pemegang wacana dominan (otoritas terkait) sementara gelandangan tidak mendapatkan ruang.

Penulis secara tidak berimbang merekonstruksi realitas tentang keberadaan gelandangan dari sudut pandang orang kedua. Teks yang ditampilkan menguntungkan otoritas sekaligus warga secara umum yang merupakan kelompok pembaca media

Solopos.com. Kelompok inilah yang merasa resah dengan keberadaan gelandangan sekaligus menganggap mereka entitas di luar kelompok.

Ketimpangan pemberitaan pada akhirnya bisa memengaruhi pengetahuan yang diproduksi di masyarakat maupun pandang pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait persoalan sosial di masyarakat.

Landasan Teori dan Metode

Mengacu kepada analisis wacana Kritis Teun A. Van Dijk ada tiga hal yang harus diteliti saat meneliti sebuah berita yaitu teks, kognisi sosial, dan analisis sosial.

Teks

Konten berita terdiri atas tiga struktur yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro merupakan pesan global yang terkandung dalam sebuah teks atau bisa juga disebut tema. Tema secara umum ini bisa berupa kesimpulan saat seseorang selesai membaca sebuah berita.

Struktur kedua adalah superstruktur. Struktur ini merupakan bagan atau kerangka penulisan yang membentuk teks menjadi satu kesatuan. Selanjutnya struktur mikro menjelaskan mengenai bagian-bagian kecil dari sebuah teks seperti kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. (Eriyanto, 2001: 227) Berikut ini penjabaran elemen wacana Van Dijk:

Struktur Wacana	Hal yang Diamati	Elemen
Struktur makro	<p>Tematik</p> <p>Tema/topik yang dikedepankan dalam suatu berita.</p>	Topik
Superstruktur	<p>Skematik</p> <p>Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita yang utuh.</p>	Skema
Struktur mikro maksud,	<p>Semantik</p> <p>Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Misal dengan memberikan detail pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detail sisi yang lain</p>	Latar, detail, praanggapan

<p>Sintaksis</p> <p>Bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih.</p>	<p>Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti</p>
<p>Stilistik</p> <p>Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita.</p>	<p>Leksikon</p>
<p>Retoris</p> <p>Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan</p>	<p>Grafis, metafora, ekspresi.</p>

Kognisi Sosial

Inti dari kognisi sosial berkaitan dengan kondisi mental seorang wartawan, ideologi, nilai yang dianut, dan sejenisnya. Makna sebuah teks sesungguhnya dibentuk oleh si pembuat teks yaitu wartawan. Sebuah peristiwa dapat dipahami dan dimengerti berdasarkan skema atau model. Skema ini, menurut Van Dijk, dikonseptualisasikan sebagai struktur mental yang di dalamnya mengandung cara penulis memandang manusia, peranan sosial, dan peristiwa.

Analisis Sosial

Analisis sosial berkaitan dengan wacana yang berkembang di masyarakat di mana penulis hidup di dalamnya bahkan ikut melaksanakan serta mereproduksinya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai analisis sosial bisa dari bagaimana wacana dominan itu diproduksi dan direproduksi baik melalui buku, pidato, dokumen pemerintahan, dan lainnya. Ada dua elemen analisis sosial yang harus diteliti yakni praktik kekuasaan dan akses terhadap wacana.

Dari sudut pandang kekuasaan, model analisis Van Dijk mengacu kepada paradigma teori kritis yang salah satunya dikembangkan Michel Foucault. Berbeda dengan Marx yang mengembangkan kekuasaan melalui kepemilikan, Foucault memahami kekuasaan bertahan melalui pengetahuan dan wacana.

Menurut Foucault, kebenaran bukanlah sesuatu yang alamiah melainkan sesuatu yang dibentuk. Negara dalam mempertahankan kekuasaan bukan melalui tindak represif melainkan melalui normalisasi dan regulasi. Kontrol dan regulasi ini ini dipraktikkan dalam kehidupan modern. Berbasis pada regulasi, kontrol menerapkan hukuman bagi yang melanggar sebaliknya hadiah bagi yang melaksanakan. Bagi Foucault, kekuasaan ada di mana-mana. Kekuasaan tidak dimiliki melainkan dipraktikkan dalam sebuah ruang lingkup di mana ada banyak hubungan di dalamnya.

METODE

Metode yang digunakan dengan model analisis Van Dijk meliputi *critical linguistics*, wawancara mendalam dengan penulis berita, serta studi pustaka. (Eriyanto, 2001: 275). Dengan metode tersebut maka kerangka analisisnya adalah sebagai berikut:

STRUKTUR	METODE
<p>Teks</p> <p>Menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu.</p> <p>Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk menyingkirkan atau memarginalkan suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa tertentu.</p>	<p>Critical Linguistics</p>
<p>Kognisi Sosial</p> <p>Menganalisis kognisi wartawan dalam memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis.</p>	<p>Wawancara mendalam</p>
<p>Analisis Sosial</p> <p>Menganalisis bagaimana wacana yang berkembang di masyarakat, proses produksi dan reproduksi seseorang, atau peristiwa yang digambarkan</p>	<p>Studi Pustaka</p>

Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi gelandangan dalam teks berita yang diunggah *Solopos.com* selama Maret sampai Oktober 2017. Dalam rentang waktu tersebut, *Solopos.com* menurunkan enam berita mengenai gelandangan. Keenam berita itu adalah,

1. 18 Gelandangan dan Pengemis Dikukut Satpol PP. Diunggah 7 Juni 2017.
2. Tinggal di Hutan, Perempuan Gelandangan Ponorogo Ini Tewas Mengenaskan. Diunggah 10 Juli 2017.
3. Wanita Tunawisma Ditemukan Tak Bernyawa di Karanggeneng. Diunggah 21 Juli 2017.

4. Fakta Mengejutkan Perempuan Gelandangan yang Lahirkan Seorang Diri. Diunggah 8 Agustus 2017.
5. Bupati Emil Jenguk dan Azani Bayi Gelandangan Penderita Sakit Jiwa. Diunggah 9 Agustus 2017.
6. Kelaparan dan Sakit, Gelandangan Tewas di Pinggir Jalan. Diunggah 21 Agustus 2017.

PEMBAHASAN

Faktor Pembaca dan Minimnya Pemberitaan tentang Gelandangan

Meski memiliki fungsi sosial seperti penyampai informasi yang akurat, pemberi edukasi, dan sejenisnya, media tetaplah sebuah industri dalam sistem kapitalisme. Keberadaan media online seperti halnya media cetak sangat bergantung kepada jumlah pembaca. Pada akhirnya jumlah pembaca inilah yang menjadi penentu banyaknya iklan yang diterima media massa tersebut.

Apabila koran cetak sangat mengandalkan jumlah pelanggan, media online di sisi lain menggantungkan hidup mereka pada traffic pembaca. Semakin banyak orang yang mengklik media online tertentu maka daya tawar media tersebut di hadapan pengiklan juga semakin tinggi.

Pemberitaan mengenai gelandangan yang ditampilkan di Solopos.com kebanyakan terkait dengan kematian sehingga masuk kategori berita kriminal. Hal itu juga bisa dilihat dari tag yang ditampilkan dalam berita gelandangan yakni tewas, Polres, kisah tragis, dan razia Satpol PP. Dalam media online, tag bisa juga disebut tema atau gagasan inti sebuah berita.

Tag ini bisa dipahami dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang penulis atau redaktur dan kedua dari sudut pandang pembaca secara umum. Tag dari sudut pandang penulis merupakan editor choice (sudut pandang berita yang layak muat berdasarkan nilai berita) sementara dari sudut pandang pembaca secara umum adalah imajinasi penulis (wartawan) tentang selera atau minat pembaca akan jenis berita tertentu.

Sebuah tag di media online biasanya berupa kata atau frase dalam bentuk metadata yang akan saling mengait di mesin pencari Google (organix-digital.com, diakses 15 Oktober 2017). Dengan demikian tag juga berfungsi menggaet pembaca yang tertarik dengan tema-tema tertentu saat mengakses mesin pencari Google.

Imajinasi mengenai calon pembaca yang dilakukan wartawan berkaitan erat dengan pengetahuan tentang berita-berita yang diminati masyarakat (public interest). Di era Internet dan media sosial (medsos) sekarang, berita-berita yang diminati bisa dilihat dari kemudahan mencari topik tertentu melalui mesin pencari Google, sharing berita melalui medsos serta komentar-komentar warganet di media online.

Pengetahuan mengenai calon pembaca menjadi dasar seorang wartawan dalam membuat sebuah berita. Berdasarkan pengetahuan itu, wartawan mengikuti jutaan peristiwa yang terjadi setiap detik di lingkungannya lantas memilah peristiwa-peristiwa mana yang layak menjadi berita. Sejatinya nilai berita saat ini tidak lagi menjadi standar kerja melainkan meluas menjadi ideologi wartawan.

Dengan latar belakang menjaring jumlah pembaca sebanyak-banyaknya, pembuatan tag biasanya sangat khusus atau mencerminkan peristiwa dan lokasi kejadian. Dalam berita berjudul Kelaparan dan Sakit, Gelandangan Tewas di Pinggir Jalan, misalnya, penulis/redaktur membuat tag Polres Ponorogo, RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan penemuan mayat Ponorogo.

Tag penemuan mayat Ponorogo jelas merefleksikan klasifikasi minat pembaca akan berita kriminal (penemuan mayat) sementara kata Ponorogo bertujuan memperjelas lokus peristiwa (tempat kejadian perkara) serta menjaring lebih banyak pembaca di kota tempat peristiwa terjadi.

Jacob Oetama, pendiri Kompas, mengatakan berita kriminal masih sangat diminati masyarakat pembaca di Indonesia. Apabila ingin menjaring jumlah pembaca yang banyak, menurut dia, maka perbanyaklah berita kriminal. Berita kriminal diminati karena muatannya yang ringan dan bentuknya yang straight news pendek. Karakter straight news kategori kriminal sangat berbeda dibandingkan berita politik atau berita yang berbentuk in-depth reporting yang kaya data sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna.

Berita kriminal seperti halnya produk budaya populer lain, menurut Adorno, menjadi sasaran konsumsi masyarakat modern. Fungsi berita kriminal tidak lagi memberi informasi atau mencerdaskan melainkan membunuh waktu luang. Dalam masyarakat kapitalis, masyarakat tidak mau berurusan dengan sesuatu yang membutuhkan pemikiran dan daya kritis setelah sehari-hari bergelut dengan pekerjaan. Mereka lebih suka melahap produk budaya populer yang karakternya mudah dipahami dan menghibur dengan cara tertentu.

Sudut Pandang Wartawan dalam Berita tentang Gelandangan

Sudut pandang wartawan dalam membuat berita mengenai gelandangan dapat dianalisis dari tiga elemen yakni teks, kognisi mental wartawan, dan ketiga analisis sosial.

Teks

Mengacu kepada elemen teks, terlihat bahwa wartawan seringkali mengambil sikap meneguhkan definisi gelandangan yang menjadi konsensus bersama yakni tunawisma yang aktivitasnya mengarah ke jalanan. Media massa lebih sering menggunakan diksi gelandangan ketimbang tunawisma meskipun di antara kedua kata ini terdapat perbedaan signifikan. Pengertian tunawisma lebih umum karena hanya menjelaskan kondisi seseorang yang tidak punya rumah. Orang-orang seperti ini masih bisa ditelusuri asal-usulnya, seperti masih memiliki KTP atau keluarga di luar wilayah (umumnya perdesaan).

Di sisi lain, gelandangan biasanya disatukan dengan istilah gepeng (gelandangan dan pengemis) atau PGOT (pengemis, gelandangan, orang gila, dan telantar) yang merujuk pada penyandang masalah sosial dan mengarahkan mereka ke aktivitas di jalanan. (David Levinson, 2004: 308)

Rekonstruksi definisi gelandangan sebagai orang yang runtang-rantung tanpa tujuan diperkuat dengan latar serta detail berita.

Judul Berita	Latar dan Detail
1. Tinggal di Hutan, Perempuan Gelandangan Ponorogo Ini Tewas Mengenangkan	Warga desa setempat juga setiap hari memberi makan gelandangan itu secara bergantian. Karena kondisi kejiwaan perempuan itu terganggu, warga tidak bisa mengetahui identitasnya.
2. Wanita Tunawisma Ditemukan Tak Bernyawa di Karanggeneng	Di sekitar jenazah tunawisma itu ditemukan beberapa barang bekas seperti sampah-sampah, uang mainan, jajanan, dan botol bekas yang di bungkus plastik.
3. Kelaparan dan Sakit, Gelandangan Tewas di Pinggir Jalan	Gelandangan tersebut hampir sepekan ini berada di sekitar jalan tersebut dan mondar-mandir di lokasi itu. Saat malam, gelandangan itu juga tidur di sekitar jalan tersebut.
4. Bupati Emil Jenguk dan Azani Bayi Gelandangan Penderita Sakit Jiwa	Dari laporan warga, beberapa petugas dari unsur babinsa TNI, babinkamtibmas Polres Trenggalek, perangkat desa, dan dinas sosial lalu melakukan upaya pertolongan dengan menghubungi pihak RSUD dr. Soedomo, Trenggalek sehingga perempuan gelandangan penderita gangguan jiwa yang berusan melahirkan berikut bayinya segera dievakuasi menuju rumah sakit guna mendapat perawatan intensif.

Stigma gelandangan sebagai orang dengan gangguan mental sangat ditonjolkan dalam kasus penemuan mayat maupun bayi di jalanan. Penonjolan ini merupakan sikap wartawan dalam mempersepsikan gelandangan sebagai entitas di luar komunitas masyarakat (termasuk komunitas wartawan) yang secara umum dikategorikan waras, bisa berkomunikasi secara jernih dengan anggota masyarakat lain, serta memiliki tempat tinggal.

Meski demikian penilaian tersebut pada akhirnya menjadi sebuah praanggapan karena mengabaikan syarat akurasi sebuah fakta. Penilaian kondisi mental terganggu seharusnya merupakan hasil pemeriksaan secara medis oleh otoritas terkait, semisal dokter atau psikiatri dari rumah sakit. Dengan demikian akurasi kondisi kejiwaan seseorang menjadi terjamin.

Sebaliknya dalam pemberitaan mengenai gelandangan, proposisi kalimat gelandangan sebagai orang dengan gangguan mental disampaikan oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi dalam bidang kesehatan jiwa yakni polisi dan saksi

(warga). Tudingan tersebut pada akhirnya mengukuhkan stigma mengenai gelandangan sebagai orang yang sakit jiwa.

Praanggapan dalam pemberitaan gelandangan tidak menimbulkan masalah di masyarakat meskipun ada pola berulang. Pentingnya akurasi diabaikan oleh wartawan dan masyarakat karena mereka memiliki anggapan yang sama mengenai gelandangan berdasarkan konsensus dan akal sehat.

Seseorang yang tinggal di jalanan, mengandalkan bantuan orang lain agar bisa bertahan hidup, dan sulit berkomunikasi dipersepsikan sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Orang yang sehat jiwanya seharusnya tinggal di suatu tempat (bisa layak maupun tak layak), namun bukan di jalanan dan mudah diajak berkomunikasi. Mereka yang tidak memenuhi kriteria itu patut dipertanyakan kesehatan jiwanya.

Koherensi

Dalam berita mengenai gelandangan yang berjudul 18 Gelandangan dan Pengemis Dikukut Satpol PP terlihat jelas bagaimana wartawan merekonstruksi dua fakta berbeda menjadi seolah-olah satu rangkaian dalam satu waktu. Kalimat di bawah ini contohnya.

Sebanyak 18 orang gelandangan dan pengemis terjaring razia gepeng di Alun-alun Kota Madiun, Selasa (6/6/2017) malam. Razia gepeng ini dilakukan karena banyak keluhan dari masyarakat mengenai keberadaan mereka.

Dari kalimat itu bisa disimpulkan Satpol PP melakukan razia karena sebelumnya ada banyak keluhan warga mengenai keberadaan gelandangan. Untuk mendukung adanya keluhan dari masyarakat tersebut, wartawan menambahkan kalimat: Plt. Kepala Satpol PP Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono, mengatakan razia gepeng ini berdasar keluhan dari warga karena banyak pengamen dan pengemis yang meminta uang dengan memaksa.

Berdasarkan elemen koherensi ini, sikap wartawan selaras dengan sikap pemerintah yang menilai keberadaan gelandangan (sebagai pengamen dan pengemis di pusat-pusat keramaian) mengganggu. Oleh sebab itu gelandangan harus ditertibkan. Elemen koherensi ini menutup kekurangan berita yang kering keterangan, khususnya terkait keluhan masyarakat. Dalam berita itu tidak ada keterangan yang jelas mengenai bentuk keluhan warga seperti apa, media apa yang digunakan mereka saat mengeluh, bagaimana keluhan mereka sampai ke Satpol PP dan polisi, kapan keluhan itu disampaikan, dan lainnya.

Koherensi kausalitas bisa saja dipraktikkan dengan hasil yang klir apabila bobot akurasi kedua kalimat seimbang. Tambahan satu narasumber dari unsur warga yang tak suka dengan keberadaan gelandangan di tempat-tempat publik atau saksi mata akan membantu memperbaiki hubungan kalimat yang terlalu timpang.

Elemen lain dalam analisis teks adalah bentuk kalimat. Pemilihan judul dalam bentuk kalimat pasif juga menunjukkan kecenderungan wartawan yang berusaha memperhalus program razia yang dilakukan Satpol PP. Dengan model kalimat induktif, Satpol PP yang seharusnya menjadi subjek kalimat sengaja ditempatkan di bagian belakang kalimat sehingga menjadi tidak jelas subjeknya. Inti berita yang seharusnya Satpol PP

melakukan razia gelandangan tersamar menjadi gelandangan yang meresahkan masyarakat akhirnya ditangkap.

Leksikon

Pemilihan kata tewas dalam berita gelandangan bukanlah praktik yang tidak disengaja. Berdasarkan KBBI daring Kemendikbud yang diakses pada 22 Oktober 2017, ada perbedaan definisi antara kata meninggal dengan tewas. Tewas, menurut KBBI, adalah mati (dalam perang, bencana, dan sebagainya). Sementara itu, meninggal berarti mati atau berpulang.

Kata tewas dalam pemberitaan biasa digunakan dalam berita-berita yang masuk dalam kategori berita kriminal. Tewas menggambarkan orang yang mengalaminya adalah korban (dalam istilah kepolisian) akibat perbuatan orang lain (biasanya disebut pelaku dalam kasus pembunuhan) atau peristiwa lain yang tidak wajar (di luar pembunuhan). Dengan demikian berita mengenai kematian gelandangan tergolong berita kriminal di mana gelandangan ditempatkan sebagai korban yang sesungguhnya juga tidak jelas merupakan korban siapa. Dua judul berikut mengukuhkan cara pandang media dalam memosisikan keberadaan gelandangan yang tewas.

1. Tinggal di Hutan, Perempuan Gelandangan Ponorogo Ini Tewas Mengenaskan
2. Kelaparan dan Sakit, Gelandangan Tewas di Pinggir Jalan

Kedua berita tersebut menceritakan tentang gelandangan yang tewas. Namun, wartawan atau redaktur menggunakan kalimat bertingkat yang justru menempatkan anak kalimat (penjelas kalimat inti) di awal kalimat. Anak kalimat itu pada akhirnya terkesan menjadi kalimat inti. Terkait dengan penggolongan berita kriminal, terlihat reporter maupun redaktur berusaha menggiring pembaca mengategorikan kedua berita tersebut sebagai kisah tragis di mana gelandangan menjadi korbannya.

Ada banyak kasus kematian dalam berita-berita kriminal yang hampir setiap hari dirilis polisi. Dari sekian banyak kasus tersebut, harus ada kekhususan dalam pemberitaan agar pembaca tertarik mengikutinya. Dengan cara menggiring pembaca pada sudut pandang kisah tragis (human interest), berita gelandangan ditampilkan di media massa diasumsikan akan dibaca banyak orang.

Meski tidak jelas siapa yang salah dalam kasus tewasnya gelandangan yang diposisikan sebagai korban, namun, otoritas terkait tetap diposisikan sebagai penyelamat pada kedua berita tersebut. Hal itu bisa dilihat dari konstruksi berita yang menonjolkan peran kepolisian dalam kedua berita yakni yang pertama menanggapi laporan warga yang menemukan gelandangan yang tewas dan selanjutnya mengevakuasi gelandangan tersebut.

Kognisi Sosial

Penulis, menurut Van Dijk, tidak boleh ditinggalkan dalam menganalisis sebuah teks sebab dialah yang memberikan makna dan menyampaikan pesan tertentu kepada pembacanya. Rekonstruksi sebuah peristiwa bukanlah proses yang bebas nilai,

melainkan sangat tergantung dari sudut pandang dan idiologi penyampai pesan yakni wartawan.

Latar belakang wartawan seperti pendidikan, nilai, dan norma yang dianut sangat memengaruhi bagaimana sebuah teks berita lahir. Beda wartawan bisa juga menghasilkan beda sudut pandang. Empat skema yang ditawarkan Van Dijk menjadi salah satu alternatif untuk menelusuri latar belakang maupun maksud wartawan saat menulis sebuah berita. Metode yang digunakan untuk mengetahui sudut pandang wartawan ini adalah melalui wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Jalil, reporter Solopos.com, yang bertugas di Kota Madiun dan sekitarnya, terdapat hubungan yang linear antara hasil analisis teks dengan sudut pandangnya mengenai gelandangan. Berikut hasil wawancara dengan Abdul Jalil yang terangkum dalam empat skema Van Dijk.

<p>Skema Person:</p> <p>Wartawan memandang gelandangan sebagai entitas di luar komunitas masyarakat. Penyebabnya mereka tidak menganut cara hidup/budaya yang menjadi konsensus warga. Gelandangan adalah orang hidupnya tidak bertujuan dan sebagian mengalami gangguan mental. Beberapa yang masih sehat akalnya tidak mau bekerja dan cenderung melakukan hal termudah untuk mendapatkan uang, misalnya dengan cara mengemis, mengamen, mencuri, dan memalak.</p>
<p>Skema Diri: wartawan adalah bagian dari komunitas masyarakat yang memegang teguh nilai dan norma yang menjadi konsensus bersama.</p>
<p>Skema Peran:</p> <p>Gelandangan adalah orang-orang yang meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat.</p> <p>Satpol PP dan polisi adalah penjaga dan penjamin keamanan.</p>
<p>Skema Peristiwa: razia adalah cara yang dilakukan Satpol PP untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tujuannya warga nyaman beraktivitas di kota.</p> <p>Peristiwa kematian gelandangan atau gelandangan melahirkan di jalan adalah peristiwa tragis karena mencerminkan problem kemiskinan dalam bentuk terburuk sehingga mengundang simpati masyarakat.</p>

Ada tiga teknik reportase yaitu observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Dalam dua berita mengenai gelandangan yang berjudul *18 Gelandangan dan Pengemis Dikukut Satpol PP; Tinggal di Hutan, Perempuan Gelandangan Ponorogo Ini Tewas Mengenaskan; serta Kelaparan dan Sakit, Gelandangan Tewas di Pinggir Jalan*, Jalil hanya menggunakan teknik wawancara yaitu mewawancarai otoritas terkait. Wawancara yang dia lakukan tidak dengan tatap muka langsung melainkan melalui

sambungan telepon. Pertimbangannya, menurut Jalil, lokasi penemuan mayat jauh dari posisinya meliputi saat itu. Pun dengan berita razia, Jalil hanya menelepon dengan pertimbangan waktu dan jarak.

Menurut Jalil, gelandangan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok waras (tidak mengalami gangguan mental) yang seringkali mengganggu/meresahkan masyarakat. Salah satu buktinya adalah penuturan polisi mengenai pengamen yang meludahi warga lantaran tak diberi uang (detail yang tidak ditulis).

Kelompok kedua adalah mereka yang mengalami gangguan mental atau kebiasaan berjalan ke sana-sini tanpa tujuan dan menggantungkan hidup mereka dari bantuan masyarakat. Kelompok ini tidak mengganggu masyarakat.

Pengategorian itu tercermin dalam pemberitaan Jalil yang terkesan memiliki standar ganda tentang pengemis, gelandangan, dan orang telantar (PGOT). Mereka yang beraktivitas di jalanan dengan jenis pekerjaan yang tidak termasuk dalam konsensus masyarakat dinilai meresahkan bahkan mengganggu.

Sebaliknya ketika gelandangan yang tidak punya uang mati karena kelaparan atau kedinginan disebut korban karena termasuk dalam kisah tragis manusia. Dalam sudut pandang Jalil, seharusnya ada pihak yang menolong para gelandangan itu agar tak mati mengenaskan. Bentuk pertolongan itu bisa berupa tempat untuk berteduh, makanan, maupun minuman.

Berita mengenai gelandangan, menurut Jalil, sesungguhnya bukan berita yang seksi (berita menarik) dari sudut pandang nilai berita (tingkat keterbacaan). Oleh sebab itu banyak wartawan yang tidak meliputnya. Gelandangan yang mati di permukiman liar atau di jalanan sering terjadi. Ada banyak kejadian sejenis yang tidak dia liput karena tidak ada sisi menarik yang bisa ditulis. Harus ada kekhasan dalam berita gelandangan tewas supaya bisa diunggah di media *online*, dibaca banyak orang, dan kemudian dibagi melalui media sosial (medsos).

Sebaliknya berita mengenai gelandangan yang meresahkan, menurut Jalil, memiliki tingkat keterbacaan tinggi karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sebagai pengguna ruang publik. Sebagai pengakses ruang publik di Madiun dan Ponorogo (lokus berita), Jalil juga kerap terganggu dengan keberadaan pengamen yang bertindak semaunya dan cenderung kasar ketika tidak diberi uang. Razia PGOT penting agar masyarakat bisa menikmati ruang publik dengan nyaman.

Analisis Sosial

Berdasarkan teori wacana Michel Foucault, negara mempertahankan kekuasaan melalui produksi pengetahuan yang dipandang sebagai kebenaran. Dalam menjalankan kontrol, negara tidak bersifat represif melainkan melalui normalisasi dan regulasi. Mereka yang patuh terhadap regulasi menjadi bagian dari komunitas. Sebaliknya mereka yang tidak mematuhi regulasi akan mendapat hukuman bahkan tidak diakui dalam komunitas tertentu. Wartawan merupakan bagian dari komunitas tersebut.

Dari sudut pandang penguasa, gelandangan merupakan orang-orang yang berada di luar komunitas masyarakat karena tidak bisa mematuhi nilai dan norma yang telah

menjadi konsensus. Tindakan razia PGOT merupakan peneguhan regulasi yang tujuannya menstabilkan kehidupan masyarakat (kehidupan yang tenang dan aman) sekaligus menunjukkan kekuasaan negara. Berikut adalah posisi gelandangan dan Satpol PP/polisi yang menjadi konsensus masyarakat.

Gelandangan	Satpol PP/polisi
Pengganggu, pembuat resah, yang menyebabkan kota menjadi tidak aman dan nyaman	Penjaga keamanan kota
Pelanggar perda dan regulasi yang setara atau di atasnya	Penegak perda dan regulasi lainnya, penegak hukum
Korban dalam kasus gelandangan tewas atau melahirkan. Warga miskin yang aksesnya terhadap kebutuhan dasar (makan, minum, kesehatan) sangat minim	Penyelamat yang menindaklanjuti laporan warga, membantu mengevakuasi jenazah, dan lainnya.

Wacana Orang Pinggiran dan Minimnya Regulasi

Munculnya pemberitaan yang memandang gelandangan secara paradoks (korban) seharusnya bisa menjadi pijakan seorang wartawan berpikir kritis mengenai entitas gelandangan di luar wacana kuasa yang dikembangkan negara bersama aparaturnya. Gelandangan adalah bagian dari persoalan kemiskinan yang merupakan PR klasik pemerintah.

Munculnya gelandangan merupakan tanda banyaknya lubang dalam program pengentasan kemiskinan. Dengan demikian kematian gelandangan dalam kondisi kelaparan dan kedinginan, merupakan bentuk terburuk kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya yakni pemenuhan hak-hak dasar manusia sesuai UUD 1945, khususnya Pasal 34 yakni:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dari sudut pandang analisis kritis, Satpol PP tidak konsisten dalam menjalankan regulasi. Sebagai penegak perda yang merupakan turunan regulasi di atasnya, Satpol PP hanya menjalankan perda-perda yang menguntungkan kelompok dominan di mana institusi tersebut menjadi bagian di dalamnya. Sebaliknya regulasi lain, Pasal 34 UUD 1945, contohnya, dan turunannya justru diabaikan.

Dalam konteks Pasal 34 tersebut, yang dibutuhkan gelandangan sesungguhnya bukan razia melainkan pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar sesuai martabat kemanusiaan.

Patut dipertanyakan apabila pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar belum diberikan, namun razia justru dikedepankan.

Persoalan lain terkait gelandangan yang tidak diungkap secara eksplisit adalah minimnya lokasi penampungan untuk mereka. Dari 35 kota/kabupaten se-Jateng, hanya ada satu tempat penampungan gelandangan yakni Balai Rehabilitasi Sosial Pengemis, Gelandangan, Orang Telantar di Semarang. Idealnya, setiap kota atau kabupaten yang terus tumbuh menjadi daerah urban memiliki tempat penampungan masing-masing.

Berita mengenai razia 18 gelandangan saat Ramadan secara implisit telah mengungkapkan betapa sederhananya penanganan terhadap gelandangan. Dalam razia itu yang dilakukan Satpol PP, para gelandangan hanya dibawa ke kantor mereka, didata, selanjutnya dilepaskan kembali lantaran tidak ada tempat penampungan khusus. Pola ini selalu berulang tanpa ada solusi.

Fakta lain yang tidak terungkap dalam pemberitaan mengenai gelandangan adalah keberadaan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi tolok ukur prioritas kegiatan pemda. Sesuai dengan UU tersebut, khususnya Pasal 1, urusan sosial merupakan urusan wajib pemerintah seperti halnya kesehatan atau pendidikan.

Namun demikian, bertahun-tahun urusan sosial tidak dilaksanakan dengan semestinya lantaran hanya bagian dari sekretariat daerah sehingga mereka tidak punya hak dalam penganggaran. Ada pula yang urusan sosialnya digabung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga akhirnya menjadi Dinsosnakertrans.

Perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) baru terjadi pada tahun ini, 2017, yakni Dinsos berdiri sendiri atau punya kewenangan penganggaran sendiri sehingga bisa melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan di lapangan. Kondisi ini seharusnya bisa menjadi acuan bagaimana cara pandang pemerintah terhadap gelandangan yang berdasarkan Permensos No. 8/2012 tentang Pedoman Penataan dan Pengelolaan Data dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial merupakan masalah sosial yang wajib dientaskan.

Produksi berita sangat bergantung kepada narasumber sebagai penyedia pesan. Dalam berita-berita mengenai gelandangan yang menjadi narasumber selalu otoritas, saksi, atau tokoh masyarakat karena akses mereka kepada wartawan sangat besar dibandingkan kelompok minoritas. Akibatnya wacana yang muncul adalah wacana kelompok dominan sementara wacana minoritas terpinggirkan.

Kesimpulan

Pemberitaan mengenai gelandangan yang ditampilkan di media massa, *Solopos.com* khususnya, menampilkan wacana dominan dalam masyarakat. Narasumber yang ditampilkan adalah kepanjangan tangan negara yakni Satpol PP dan polisi dengan modal kekuasaan untuk mengontrol kehidupan sosial melalui sejumlah regulasi yang berbasis pada pengetahuan dan kebenaran.

Menggunakan metode analisis wacana kritis Van Dijk, teks mengenai gelandangan meneguhkan pengetahuan kebenaran yang diproduksi oleh penguasa mengenai munculnya gangguan keamanan dan penyakit sosial. Wartawan sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang memiliki bekal pengetahuan sama, nilai dan norma,

maupun kewajiban yang sama, menyeleksi narasumber dan detail berita dengan tujuan melanggengkan relasi kekuasaan yang telah mapan terbangun. Definisi gangguan keamanan yang ditetapkan otoritas terkait sejalan dengan persepsi wartawan mengenai kenyamanan dan keamanan kota maupun bentuk-bentuk pekerjaan yang sesuai.

Situasi paradoks mengenai persoalan kemiskinan dan tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia pada akhirnya memang muncul dalam berita mengenai gelandangan yang tewas atau yang melahirkan di jalan. Namun, kondisi tersebut disederhanakan dengan tema yang bisa diterima bersama dalam komunitas masyarakat yaitu situasi tragis atau tragedi kehidupan.

Dari sudut pandang wartawan maupun otoritas terkait, gelandangan sebagai entitas di luar komunitas (lantaran tidak mampu berkomunikasi dan tidak punya nama karena tidak beridentitas), patut dikasihani dalam bentuk pemberian secara instan semisal makanan, minuman, atau uang. Wacana kegagalan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan maupun pemenuhan hak-hak dasar manusia tidak muncul karena nihilnya wacana minoritas dalam pemberitaan. Minimnya akses gelandangan atau bahkan bisa disebut tak ada kepada wartawan menghilangkan wacana tersebut tersebut.

Daftar Pustaka

- Eriyanto, 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKIS
- Eriyanto, 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS
- Gigi, Meenakshi dan M. Keller. 2006. *Media and Cultural Studies Keyword*. Australia: Blackwell Publishing Ltd.
- Ishak, Saidulkarnain. 2014. *Jurnalisme Modern: Panduan Praktis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ishwara, Luwi. 2011. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Levinson, David. 2004. *Encyclopedia of Homelessness Vol 1*. London: Sage Publication.
- Oetama, Jacob. 2001. *Pers Indonesia: Berkomunikasi dengan Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Robot, Marselus. 2016. *Bila Ujung Pena Menusuk Jantung Rezim: 9 Hari Surat Kabar Indonesia Menjatuhkan Soeharto*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yusuf, Akhyar. 2014. *Teori dan Metodologi: Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- organix-digital.com, diakses 15 Oktober 2017
- <https://kbbi.web.id/> diakses 15 Oktober 2017
- <http://kotamadiun.jdih.jatimprov.go.id/#> diakses 22 Oktober 2017.